

PEMKAB LUNCURKAN PROGRAM BPNT 2024

Manfaatkan Aplikasi 'Raharjo' Bank BPD DIY



KR-Asrul Sani

KPM menerima BPNT 2024 secara simbolis dari Pj Bupati Ni Made Dwipanti Indrayanti disaksikan Pinca Bank BPD DIY Cabang Wates Nur Afan Dwi Saputro (dua kiri) dan Kepala Dinsos PPPA, Bowo Pristiyanto.

LENDAH (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo launching Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2024. Dengan memanfaatkan Aplikasi Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat Jogja (Raharjo) Bank BPD DIY, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) kabupaten setempat menyerahkan secara serentak bantuan kepada 4.400 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) melalui 24 e-warung.

"Selain bertujuan membantu masyarakat yang masuk dalam Kelompok Penerima Manfaat (KPM), Program BPNT juga bertujuan mengoptimalkan komoditas lokal Kulonprogo khususnya bahan pangan yang nanti menjadi komoditas dari BPNT," kata Penjabat (Pj) Bupati setempat Ni Made Dwipanti Indrayanti saat launching Program BPNT 2024 dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinsos PPPA dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Mitra dan Bank Penyalur di Waroeng Kube Murni 24 Temben, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulonprogo, DIY, Rabu (28/2).

Yang dimaksud bahan pangan adalah hasil produksi dari kelompok kelompok masyarakat atau petani lokal di kabupaten ini yang dibina OPD Mitra dan telah di sepakati dengan perjanjian kerja sama. "Dengan membeli dan menghasilkan produk lokal diharapkan roda perekonomian berputar di Kulonprogo. Perekonomian kita dari Kulonprogo untuk Kulonprogo," jelas Ni Made.

Sementara itu Pemimpin Cabang

(Pinca) Bank BPD DIY Cabang Wates, Nur Afan Dwi Saputro MM mengaku bersyukur lembaga perbankan yang dipimpinnya kembali dipercaya Dinsos dan PPPA Kulonprogo untuk membantu penyaluran BPNT 2024.

Penyaluran BPNT 2024 merupakan tahun kelima Bank BPD DIY turut sukseskan program ini yaitu sejak tahun 2020. Pada 2024 penyaluran BPNT menggunakan Aplikasi Raharjo yang dikembangkan Bank BPD DIY untuk membantu penyaluran bantuan non tunai bagi masyarakat Yogyakarta.

"Dengan Aplikasi Raharjo kami berharap, Pemkab Kulonprogo semakin terbantu dalam proses penyaluran BPNT secara cepat, tepat dan mudah baik untuk Pemkab Kulonprogo maupun bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," ujar Nur Afan Dwi Saputro.

Kepala Dinsos dan PPPA Kulonprogo, Drs L Bowo Pristiyanto mengungkapkan, komoditas BPNT terdiri beras, telur, lele, gula Jawa, tahu, tempe, sayur dan buah. Dengan hadirnya BPNT di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu meringankan beban masyarakat, harap Bowo.

Sebagai mitra Pemkab Kulonprogo maka Bank BPD DIY telah mengembangkan aplikasi yang bertujuan memudahkan pengelolaan bantuan di pemerintah kabupaten/ kota di DIY.

"Kehadiran Aplikasi Raharjo diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal. Sehingga bantuan dapat disalurkan pada masyarakat secara digital, tepat sasaran dan tepat jumlahnya," tutur Bowo.

(Rul)-f

TARGET SELESAI TAHUN INI

Pembangunan Gedung DPRD Tinggal 25 Persen

WONOSARI (KR) - Proses dan tahapan pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul akan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2024. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) setempat mencatat bahwa saat ini pembangunan gedung wakil rakyat tersebut telah mencapai 75 persen. Menurut Kabid Cipta Karya DPUPRKP Gunungkidul, Nanang Irawanto pembangunan gedung DPRD masih ada sekitar 25 persen yang belum diselesaikan. Saat ini masih harus membangun untuk lanskap dan interior, katanya Rabu (28/2).

Untuk pembangunan lanskap termasuk area parkir, taman, dan pagar dengan anggaran sebesar Rp1,9 miliar. Sedangkan untuk penataan interior dengan pagu anggaran sebesar Rp1,5 miliar. Jika ditotal pembangunan gedung tersebut menelan anggaran sekitar Rp 33 miliar dengan pelaksanaan pengerjaan sejak tahun anggaran 2022 dengan skema tahun jamak.

"Gedung dengan konstruksi empat lantai tersebut juga dilengkapi dengan genset senilai Rp 850 juta, termasuk untuk pengadaan lift," imbuhnya.

Terpisah Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho SS mengatakan pembangunan gedung tersebut dapat dilakukan sesuai perencanaan baik waktu maupun kualitas dengan didanai APBD Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan gedung baru memang diperlukan karena DPRD membutuhkan ruang yang lebih luas untuk berbagai kegiatan. Dengan pembangunan gedung yang representatif tersebut nantinya diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan dewan seperti publik hearing, dengar pendapat mengundang atau menerima tamu dan lainnya.

Berdasarkan evaluasi dan progres yang dilakukan DPUPRKP Gunungkidul pembangunan gedung tersebut lebih cepat dari waktu yang telah dijadwalkan. Tetapi hingga saat ini gedung tersebut belum dapat ditempati karena masih ada pengerjaan lain. (Bmp)-f

SASARAN DI WILAYAH PERBATASAN

Satpol PP Amankan 685 Rokok Ilegal

WONOSARI (KR) - Satpol PP Kabupaten Gunungkidul mengamankan 685 bungkus rokok ilegal tidak disertai pita Cukai Hasil Tembakau (CHT). Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Gunungkidul, Ngatjo mengatakan razia rokok tanpa cukai dilakukan selama lima kali di wilayah perbatasan yang selama ini menjadi sasaran peredaran. "Razia dilakukan terpadu melibatkan Kantor Bea Cukai Yogyakarta," katanya Rabu (28/2).

Distribusi rokok ilegal ini diperkirakan berasal dari luar Gunungkidul dan sasarannya di daerah pinggiran terutama wilayah perbatasan Gunungkidul-Jawa tengah. Pada Tahun 2023 lalu di Gedangsari perbatasan Gunungkidul-Klaten, Jawa tengah ditemukan 189 bungkus, di Karangmojo 166 bungkus; Saptosari dan Playin ditemukan 64 bungkus. Terakhir di Kalurahan Karangmojo ditemukan 266 bungkus.

Dalam hal ini pihaknya hanya memiliki kewenangan deteksi peredaran rokok tanpa cukai kemudian dilaporkan melalui aplikasi Sistem Informasi Rokok Ilegal (Siroleg). "Rokok ilegal yang beredar tidak ada pita cukai dan tanpa mencantumkan kota produksi," imbuhnya.

Terkait adanya peredaran rokok ilegal pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Karena selain berkaitan dengan dampak kesehatan, rokok tanpa cukai juga merugikan negara karena tidak ada pajak yang diterima. Sedangkan razia rokok tanpa cukai merupakan bagian dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh Satpol PP.

"Komposisi rokok tanpa cukai yang diperkirakan jauh dari pengawasan bisa berpotensi membahayakan kesehatan," terang kepala Satpol PP Gunungkidul Edy Basuki. (Bmp)-f

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KULONPROGO

Telusuri Penyebab Mahalnya Harga Beras

WATES (KR) - Mahalnya harga beras di pasaran saat ini menjadi perhatian Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kulonprogo. Sehingga melakukan penelusuran penyebab melonjaknya kebutuhan pokok masyarakat tersebut. Tingginya permintaan hingga pola tanam padi yang berubah diindikasikan menjadi penyebabnya.

Menurut Sub Koordinator Seksi Produksi, Bidang Tanaman Pangan, DPP setempat, Kirmi, muara permasalahan salah satunya akibat mundurnya masa tanam padi. "Harusnya tanam mulai September 2023 tapi mundur sampai sekitar satu setengah bulan," kata Kirmi, kemarin.

Kondisi tersebut ungkapnya membuat panen jadi ikut mundur. Dicontohkan panen padi di Kapanewon Nanggulan yang seharusnya berlangsung Januari, saat ini masih dalam masa tanam. Harga

beras yang saat ini tinggi juga membuat petani tidak berani menyetok banyak gabah kering di penggilingan. Jika biasanya bisa sampai 50 ton gabah, saat ini hanya menyediakan 5 sampai 10 ton gabah.

"Sebagai contoh, untuk beras medium di penggilingan harganya sudah Rp 15 ribu perkilogram (kg)," jelasnya memastikan ketersediaan beras di tingkat petani hingga penggilingan tetap ada dan cadangan hasil panen juga tersimpan di masing-masing rumah tangga petani. Kirmi berharap para petani tidak

langsung menjual beras dalam jumlah besar saat harga sedang tinggi. Sebab berpotensi menimbulkan masalah nanti. "Masyarakat juga kami imbau membeli beras secukupnya saja sesuai kebutuhan, tidak perlu panik," tuturnya.

Permintaan yang tinggi jelasnya membuat harga beras terus melambung. Belum lagi dengan adanya program bantuan sosial, beras jadi salah satu komoditasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kulonprogo, Ir Sudarna tidak menampik pasokan beras di pasaran saat ini terbatas karena dari penggilingan tidak berani menyetok banyak. Pihaknya memastikan tidak terjadi fenomena kelangkaan beras di kabupaten ini. Sebab semua jenis beras masih tersedia di pasaran, khususnya di wilayah Wates. (Rul)-f

Granat Aktif Ditemukan di Goa Pindul

WONOSARI (KR) - Sebuah granat nenas masih aktif yang ditemukan di Kawasan Obwis Goa Pindul Gelaran I, Bejiharjo, Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Kapolsek Karangmojo, Kompol Agus Sunarno menyatakan granat aktif itu pertama kali ditemukan oleh seseorang yang sedang menyelam di kedalaman air kisaran 4 meter. "Granat temuan itu sebelum dilaporkan diamankan di bawah tebing," katanya Rabu (28/2).

Informasi di lokasi kejadian menyatakan siang hingga sore hari

cukup ramai wisatawan. Ditengah kesibukan warga ada seorang warga yang melakukan penyelaman menemukan benda mencurigakan. Setelah dilakukan pengecekan ternyata sebuah granat dalam keadaan sudah berkarat dan kuno. Setelah itu benda temuan dibawa ke pos keamanan. Karena diduga masih aktif diamankan di tempat yang jauh dari pusat kerumunan warga.

Pihak Polsek Karangmojo yang menemima laporan langsung melakukan penanganan sterilisasi wilayah dengan memasang police

line di sekitar lokasi penemuan. Kemudian dilakukan upaya evakuasi granat bersama Tim Jihandak Gegana Poldad DIY.

Granat tidak bisa diidentifikasi karena sebagian sudah berkarat dan granat masih aktif. Kemudian granat tersebut dibawa menuju Kali Oya yang berada di sekitar Jembatan Gonjing oleh Tim Jihandak Gegana Poldad DIY. "Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan granat temuan sudah diledakkan menggunakan peredam," ujarnya. (Bmp)-f

JARING KONSUMEN ASN DI KULONPROGO

Diskop UKM Buat Aplikasi Bela Beli Kulonprogo

PENGASIH (KR) - Dalam upaya memasarkan produk-produk usaha mikro dengan konsumen Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo maka, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) setempat membuat Aplikasi Bela Beli Kulonprogo.

Menurut Kepala Diskop dan UKM Kulonprogo, Iffah Muffidati SH, dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro di kabupaten ini, diperlukan kebijakan afirmatif yang diwujudkan dengan menggelorakan kembali Gerakan Bela Beli Kulonprogo.

"Implementasi Gerakan Bela Beli Kulonprogo dalam rangka mendukung pemberdayaan produk usaha mikro tersebut diwujudkan antara lain dengan membangun Aplikasi Bela Beli Kulonprogo," kata Iffah Muffidati, Rabu (28/2).

Dalam kurun waktu Oktober 2023 hingga Februari 2024, pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Bank BPD DIY, Dinas Pariwi-

sata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial PPPA dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dalduk dan KB merancang dan membuat Aplikasi Bela Beli Kulonprogo yang saat ini bisa diakses pada website <https://belabeliku.kulonprogo.kab.go.id>.

"Sampai sekarang 202 pelaku usaha dengan 743 produk yang cukup variatif mulai dari makanan dan minuman, kuliner, fashion, kerajinan dan bahan pokok penting (bapokting) lokal sudah bergabung di Aplikasi Bela Beli Kulonprogo," jelasnya menambahkan proses kurasi masih terus berlangsung hingga aplikasi ini siap digunakan yang direncanakan mulai Maret mendatang.

Kabid Permodalan Dinas Koperasi UKM Kulonprogo Pratiwi Ngasaratun mengungkapkan, pembelian melalui Aplikasi Bela Beli Kulonprogo cukup mudah sebagaimana marketplace pada umumnya. Setelah login dan memilih produk yang hendak dibeli, calon konsumen tinggal melakukan tiga klik yakni

checkout barang, klik bayar dengan scan barcode QRIS dan menyelesaikan pembelian dengan memberikan rating pada produk yang dibeli.

Sementara dari sisi penjual cukup melakukan dua kali klik, yaitu konfirmasi pemesanan dan konfirmasi pengemasan. "Aplikasi ini cukup mudah dipraktikkan," tuturnya.

Sementara itu Pj Bupati Kulonprogo, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengapresiasi positif inovasi program BelaBeliKu tersebut sebagai salah satu wujud nyata dari Gerakan Bela Beli Kulonprogo. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah mengenai kemudahan penggunaan aplikasi, kecepatan respon dari penjual serta harga komoditi yang tidak melebihi kewajaran harga pasar.

Berkenaan dengan calon konsumen ASN di Kulonprogo, Ni Made mengatakan perlunya survei melihat kebutuhan konsumen terutama produk-produk di luar kebutuhan pokok. "Hal ini supaya semua kebutuhan ASN dan pegawai lainnya dapat dilayani melalui aplikasi ini," jelasnya. (Rul)-f

JICA GRASS-ROOT PROJECT-FKH UGM YOGYA

Tingkatkan Pembibitan Ternak Sapi di Gunungkidul

WONOSARI (KR) - JICA Grass-Root Project 2022-2025 diselenggarakan oleh Yamaguchi University Jepang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sasaran kegiatan ini adalah dokter hewan dan petugas inseminator di Kabupaten Gunungkidul yang bertujuan untuk peningkatan perbibitan ternak sapi. Indikator yang akan dicapai untuk perbaikan reproduksi ternak sapi antara lain penurunan open periode (jarak waktu setelah beranak hingga sapi bunting kembali) naik 80% dibandingkan pada awal kegiatan. Terjadi peningkatan jumlah kelahiran sebesar 1,1 kali dibandingkan pada awal kegiatan.

"Sampai sekarang sudah empat peserta dari Gunungkidul yang dibimtek di Universitas Yamaguchi Jepang selama dua minggu," kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan



KR-Endar Widodo

Tim dari Jepang memeriksa ternak sapi di berbagai UPT di Gunungkidul.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul drh Retno Widyatuti, Rabu(28/2).

Sebagai tindak lanjut kegiatan yang dimulai tahun lalu, beberapa hari ini Tim JICA- Grass Root Project kembali mengunjungi Kabupaten Gunungkidul, antara lain, Profesor Hiroshi Sato (Universitas Yamaguchi), Profesor Otoi, Dr Masasayu Taniuchi (Universitas Yamaguchi)

Dr Maiku Abe (Universitas Prefectural Yamaguchi) dan DrTopas Wicaksono. Pada kunjungan tahun lalu melakukan kegiatan pemeriksaan dan penentuan akseptor yang disetiap UPT Puskesmas menyiapkan paling tidak 20 ekor akseptor yang akan menjalani pemeriksaan dan perlakuan sinkronisasi estrus. Dalam kunjungan sekarang melihat hasil sinkronisasi es-

trus, dari 128 akseptor yang berhasil 49 ekor. Kegiatan selama tiga hari di Gunungkidul, berupa pemeriksaan jebung (PKB) dan juga jaringan akseptor baru. "Kegiatan akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 27-29 Februari 2024 di lokasi wilayah UPT Puskesmas se-Kabupaten Gunungkidul," tambahnya. (Ewi/Ded)-f